

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penataan fasilitas pedestrian belum menjadi prioritas utama yang diperhatikan pemerintah. Selama ini pembangunan jalan hanya akan diikuti dengan pembangunan fasilitas pedestrian jika dananya terpenuhi. Pada akhirnya, pembangunan fasilitas pedestrian akan ditangguhkan pada anggaran pembangunan yang akan datang. Jalur pejalan kaki diperlukan sebagai komponen penting yang harus disediakan untuk meningkatkan keefektifan mobilitas warga di perkotaan. (DR. Dadang Rukmana (Direktur Perkotaan) 2013. Kebutuhan terhadap Pedoman Pejalan Kaki. Kementerian Pekerjaan Umum – Direktorat Jenderal Penataan Ruang).

Saat ini ketersediaan jaringan pejalan kaki yang aman, nyaman, dan manusiawi di kawasan perkotaan belum dapat memenuhi kebutuhan warga baik dari segi jumlah maupun standar penyediaannya. Selain itu, keterpaduan antarjalur pejalan kaki dengan tata bangunan, aksesibilitas antarlingkungan, dan sistem transportasi masih belum terwujud.

Sebagai wilayah yang dekat dengan Ibukota Jakarta, Kabupaten Bekasi merupakan wilayah yang mempunyai mobilitas yang cukup tinggi. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Bekasi ini dilalui oleh jalan arteri primer yang menghubungkan antar Kota atau Kabupaten yang terletak di Wilayah Pengembangan 1 atau di Bekasi bagian tengah. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTDR dan PZ WP I (ZONA TENGAH), Wilayah Pengembangan I Bekasi diperuntukan sebagai pengembangan industri, perdagangan dan jasa, perumahan dan permukiman, pariwisata dan pendukung kegiatan industri. Wilayah yang termasuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) I yaitu Bekasi bagian tengah, dengan pusat di perkotaan Tambun dan meliputi wilayah pelayanan Tambun Selatan, Cibitung, Cikarang Utara, Cikarang Barat, Cikarang Timur, dan Cikarang Selatan, tata guna lahan tersebut diperuntukan sebagai

wilayah Komersial Perdagangan dan Jasa Regional (KPJ-1), serta Komersial Perdagangan dan Jasa Skala Kecamatan (KPJ-2).

Berdasarkan paparan di atas, hal tersebut dapat memicu pesatnya pertumbuhan kegiatan perdagangan yang berada pada pusat kota Kecamatan Cikarang Utara. Selain itu karena posisi pusat kota Kecamatan Cikarang Utara berada di antara terminal dan stasiun sehingga aktivitas perdagangan dan jasa yang terjadi di kawasan pusat Kota Kabupaten Bekasi ini sangat pesat, aktivitas yang terjadi tidak di imbangi dengan penyediaan dan peningkatan fasilitas - fasilitas pada jalur pejalan kaki seperti penerangan jalan pada malam hari, telepon umum, tempat sampah, pepohonan sebagai penyejuk dan pelindung, tempat menunggu angkutan umum atau halte/shelter, tanda-tanda petunjuk, rambu lalu lintas, dan sebagainya, membuat para pejalan kaki merasa tidak aman dan nyaman dalam melakukan aktivitasnya. Oleh sebab itu perlu dilakukannya perancangan fasilitas pejalan kaki untuk penyediaan fasilitas pejalan kaki dengan tujuan untuk mendukung kegiatan para pengguna fasilitas pejalan kaki dalam melakukan aktivitas di kawasan pusat kota Kecamatan Cikarang Utara, tepatnya pada Desa Cikarang Kota, berada pada perempatan jalan yaitu antar pertemuan jalan arteri primer dengan jalan kolektor sekunder. Di bawah ini akan ditampilkan mengenai masalah-masalah yang terjadi lokasi penelitian.

Gambar 1.1
Masalah Eksisting Pusat Kota Kecamatan Cikarang Utara



Sumber : Hasil Observasi, 2018

Berdasarkan gambar di atas dapat terlihat mengenai masalah-masalah yang terjadi disebabkan oleh sektor informal Pedagang Kaki Lima (PKL), para pengendara yang *parkir on the street* hingga memakan jalur pedestrian, dan fasilitas penyeberangan yang sudah rusak, usam, bahkan sudah sangat tidak layak untuk digunakan.

Kemudian dari segi penataan serta perencanaan trotoar yang tidak sesuai dengan standar, jarak antara pengendara dengan para pejalan kaki, jalur pejalan kaki yang terputus dan tidak berkesinambungan, sehingga membuat para pejalan kaki tidak merasa aman dan nyaman dalam melakukan akvitasnya di jalur pejalan kaki. Oleh sebab itu penataan jalur pejalan kaki perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada jalur pejalan kaki ini, agar dapat mengembalikan fungsi jalur pejalan kaki dan memberikan keamanan, serta kenyamanan para pejalan kaki dalam melakukan akvitasnya, melalui teori-teori jalur pejalan kaki yang sudah ada. Karena, secara umum tercapainya kualitas jalur pejalan kaki yang ideal pada suatu kawasan akan berpengaruh pada perubahan kawasan-kawasan lain, karena semuanya merupakan suatu sistem yang saling berkesinambungan membentuk seperti sebuah jaring-jaring luas yang saling berhubungan dan saling terkait fungsi-fungsinya.

Sebagai tahapan awal untuk mengatasi masalah tersebut maka perlu penelitian mengenai bagaimana dilakukannya penilaian mengenai fungsi persediaan fasilitas pejalan kaki di kawasan pusat kota Kecamatan Cikarang Utara untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi pada kondisi eksisting, sebagai dasar penyusun prinsip - prinsip perancangan untuk melakukan aktivitas seperti trotoar yang beralih fungsi menjadi Pedagang kaki lima, Tempat parkir sembarang atau dapat disebut juga sebagai *Parkir On Street*, tidak terhubungnya antara trotoar satu dengan trotoar lainnya, dan tidak tersedianya fasilitas pendukung serta fasilitas penunjang jalur pedestrian, agar dapat mengembalikan fungsi jalur pedestrian, mengembalikan hak para pejalan kaki untuk dapat menggunakan jalur pejalan kaki yang layak sesuai dengan standar sehingga para pejalan merasa aman dan nyaman dalam melakukan aktifitasnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang studi, maka untuk mengatasi persoalan yang terjadi di Pusat Kota Kecamatan Cikarang Utara terutama mengenai jalur pedestrian perlu dilakukan penelitian untuk merumuskan prinsip-prinsip perancangan fasilitas pejalan kaki dengan membandingkan kondisi eksisting, ketentuan normatif, dan ketentuan dari literatur.

Dengan memperhatikan aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam merancang fasilitas pejalan kaki yang nyaman, aman, dan berestetika, yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam penyediaan fasilitas umum di kawasan pusat kota Kabupaten Bekasi dan diperuntukan untuk para pengguna fasilitas pejalan kaki.

Kemudian komponen-komponen pelengkap dan pendukung perancangan fasilitas pejalan kaki mengacu pada peraturan Normatif dan bahan literatur sebagai bahan yang dijadikan untuk tolak ukur, sehingga perancangan fasilitas pejalan kaki dapat membuat para pejalan kaki nyaman, dan aman, serta dapat meningkatkan kualitas kota dalam penyediaan fasilitas sarana masyarakat.

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan adalah bagaimana cara merumuskan prinsip perancangan fasilitas pejalan kaki sesuai dengan konsep kawasan pusat kota. Persoalan penelitian yang timbul akibat adanya persoalan yang ada saat ini di kawasan pusat kota Kecamatan Cikarang Utara, yaitu;

1. Aspek apa saja yang menjadi pertimbangan dalam merancang fasilitas pejalan kaki untuk kawasan pusat kota dan sesuai karakteristik pergerakan pengunjung di sekitar kawasan pusat kota Kecamatan Cikarang Utara?
2. Komponen apa saja yang perlu diatur dalam perancangan fasilitas pejalan kaki di kawasan pusat kota Kecamatan Cikarang Utara?

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari dilakukannya Penelitian Tugas Akhir ini adalah untuk merumuskan prinsip-prinsip penyediaan perancangan fasilitas pejalan kaki di pusat kota Kabupaten Bekasi.

Adapun sasaran studi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Teridentifikasinya kawasan pusat kota Kecamatan Cikarang Utara khusus penyediaan fasilitas pejalan kaki berdasarkan literatur.
2. Teridentifikasinya aspek yang dipertimbangkan dan komponen yang perlu di atur dalam merancang fasilitas pejalan kaki di kawasan pusat kota Kecamatan Cikarang Utara.
3. Teridentifikasi struktur persoalan pengembangan dan pejalan kaki dipusat kota Kecamatan Cikarang Utara berdasarkan aspek yang dipertimbangkan dan komponen yang perlu diatur
4. Contoh – contoh penerapan prinsip perancangan di pusat kota Kecamatan Cikarang Utara.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

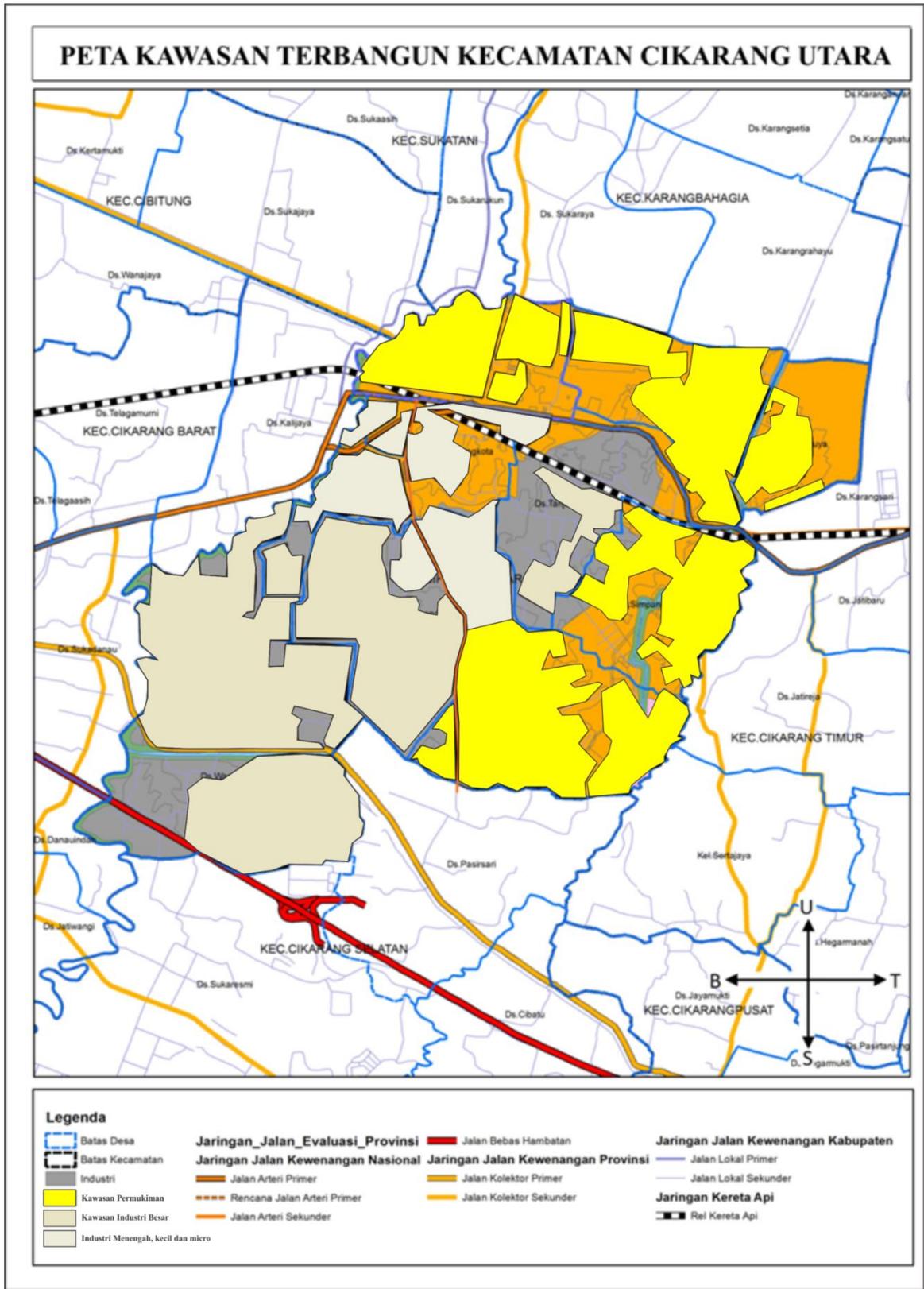
Ruang lingkup terdiri dari ruang materi dan ruang lingkup wilayah studi, kemudian untuk ruang lingkup studi penelitian yang dilakukan ini meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi yang menjadi batasan di dalam analisis maupun kajian dalam penelitian ini.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah Studi

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini meliputi Kawasan Pusat Kota, di Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara - Kabupaten Bekasi. Kecamatan Cikarang Utara terdiri dari 11 (sebelas desa) Desa, dari 11 (sebelas desa) yang berada pada Kecamatan Cikarang Utara tidak semua desa yang ada di Kecamatan Cikarang Utara memiliki karakteristik atau ciri sebagai pusat kota.

Hanya Desa Cikarang Kota yang mempunyai Karakteristik sebagai kawasan pusat kota, karena pada kawasan pusat kota tata guna lahan utamanya digunakan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, tata guna lahan tersebut sesuai dengan kondisi eksisting yang meurpakan sebagai kegiatan pusat perdagangan dan jasa, oleh sebab itu penelitian ini terletak pada Desa Cikarang Kota. Di bawah ini akan ditampilkan peta kawasan pusat kota yang terletak pada Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara – Kabupaten Bekasi.

Gambar 1.2
Peta Ruang Lingkup Studi Kawasan Pusat Kota



Sumber : Hasil Analisis 2018

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa wilayah studi ini terletak di pertemuan jalan arteri primer Jl. R.E. Martadinata dengan jalan arteri sekunder yaitu Jl Kapten Sumantri, dan Jl. Industri terletak pada Desa Cikarang desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara - Kabupaten Bekasi. Batas penelitian studi yaitu berdasarkan posisi akhir dari pusat - pusat kegiatan perdagangan, dan jasa, pada kondisi eksisting di kawasan pusat kota Kabupaten Bekasi.

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Perancangan fasilitas pejalan kaki di pusat kota memerlukan data mengenai ketentuan normatif, dan Literatur, untuk dibandingkan dengan kondisi eksisting dari segi fasilitas pejalan kaki. Kondisi fisik eksisting fasilitas jalur pejalan kaki adalah kondisi nyata yang berada dilapangan yang diperoleh melalui observasi lapangan. Untuk ketentuan normatif, dan literatur, yaitu merupakan acuan pertimbangan peraturan - peraturan serta standar minimum perancangan fasilitas pejalan kaki.

Berdasarkan hal tersebut maka keadaan kondisi eksisting dan peraturan - peraturan yang terkait serta dari kajian literatur mengenai perancangan fasilitas pejalan kaki di pusat Kota Kabupaten Bekasi dapat digunakan sebagai *input* dalam penentuan saran perancangan fasilitas pejalan kaki yang sesuai dengan standar, dan lahan yang tersedia pada kondisi eksisting, membuat nyaman dan aman untuk di terapkan di pusat kota Kabupaten Bekasi.

1.5 Metodologi Penelitian

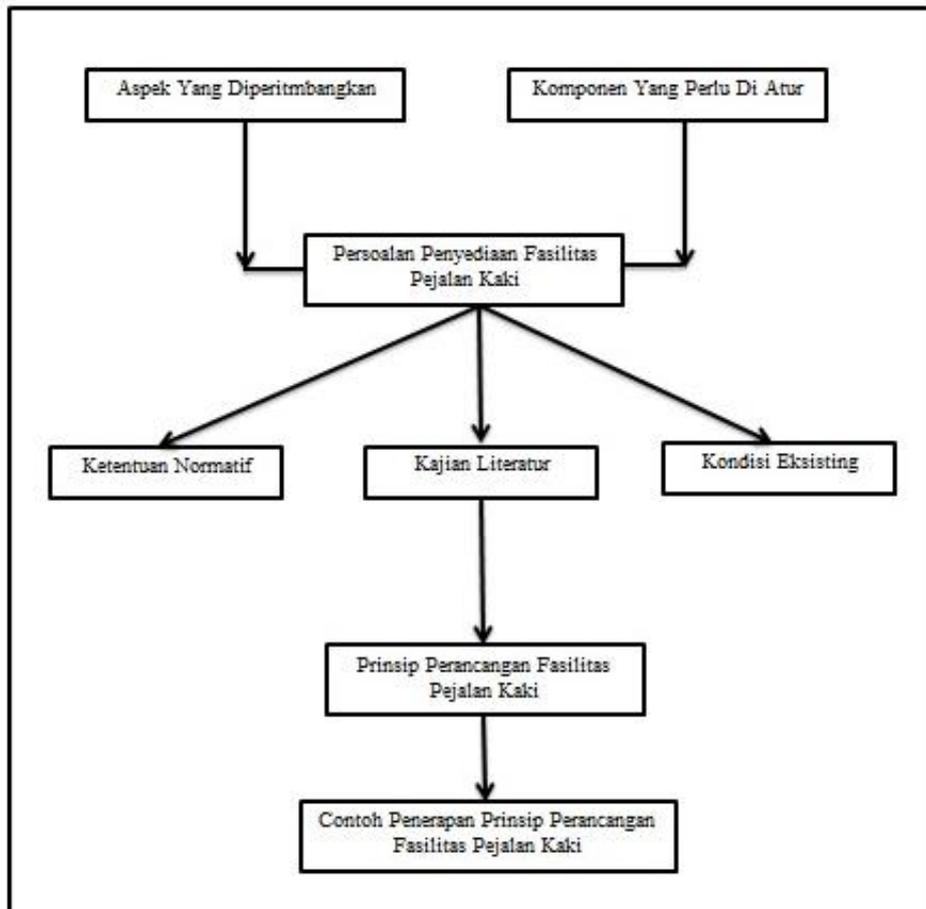
Rekomendasi perancangan fasilitas jalur pejalan kaki ini disusun berdasarkan pendekatan kondisi eksisting, dan ketentuan normatif, serta kajian literatur perancangan fasilitas jalur pejalan kaki. Tahapan pengerjaan terdiri dari pengumpulan informasi (*input*), yang berupa sebuah usulan perancangan fasilitas pejalan kaki, serta observasi lapangan yang dilakukan.

1.5.1 Pendekatan

Pendekatan yang dilakuakn dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan kajian literatur yang dilakukan dengan mengumpulkan data – data

observasi lapangan, dengan cara melihat kondisi saat ini fasilitas pejalan kaki. Dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan prinsip perancangan fasilitas pejalan kaki dilakukan dengan memperhitungkan ketentuan normatif, kajian literatur, dan mempertimbangkan kondisi eksisting fasilitas pejalan kaki penelitian ini dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1.3
Pendekatan Studi



Sumber : Hasil Analisis 2018

Bersarkan gambar di atas bahwa perancangan fasilitas pejalan kaki dengan mengacu pada peraturan normatif dan kajian literatur, dengan mempertimbangkan kondisi eksisting. Agar dapat menerapkan prinsip perancangan fasilitas pejalan kaki sesuai dengan kondisi eksisting, dan tetap sesuai standar.

1.5.2 Tahapan Pengumpulan Informasi

1. Identifikasi ketentuan normatif dan kajian literatur perancangan fasilitas jalan kaki

Mempelajari pustaka yang berkaitan dengan fasilitas jalan kaki, berupa peraturan, metoda, dan standar minimum perancangan fasilitas jalan kaki, serta karakteristik umum pejalan, sebagai acuan untuk merancang fasilitas jalan kaki.

2. Identifikasi sisi sediaan fasilitas pejalan kaki

Observasi lapangan dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting fasilitas pejalan kaki, pengukuran dimensi fasilitas jalan kaki, dan kelengkapan fasilitas penunjang yang ada.

Selanjutnya, setelah data dan informasi yang diperlukan sudah di dapat maka dilakukan tahap analisis. Teknik analisis yang digunakan untuk mengolah data perbandingan antara ketentuan normatif, kajian literatur, dengan observasi lapangan adalah dengan menggunakan analisis deskriptif. Data mengenai kondisi eksisting fasilitas pejalan kaki melalui observasi lapangan dan pola pergerakan dari hasil observasi kemudian diolah menggunakan analisis deskriptif. Penentuan perancangan fasilitas pejalan kaki ditentukan dari pedoman perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan (Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan) dan kajian literatur *Pedestrian Ways Dalam Perancangan Kota*.

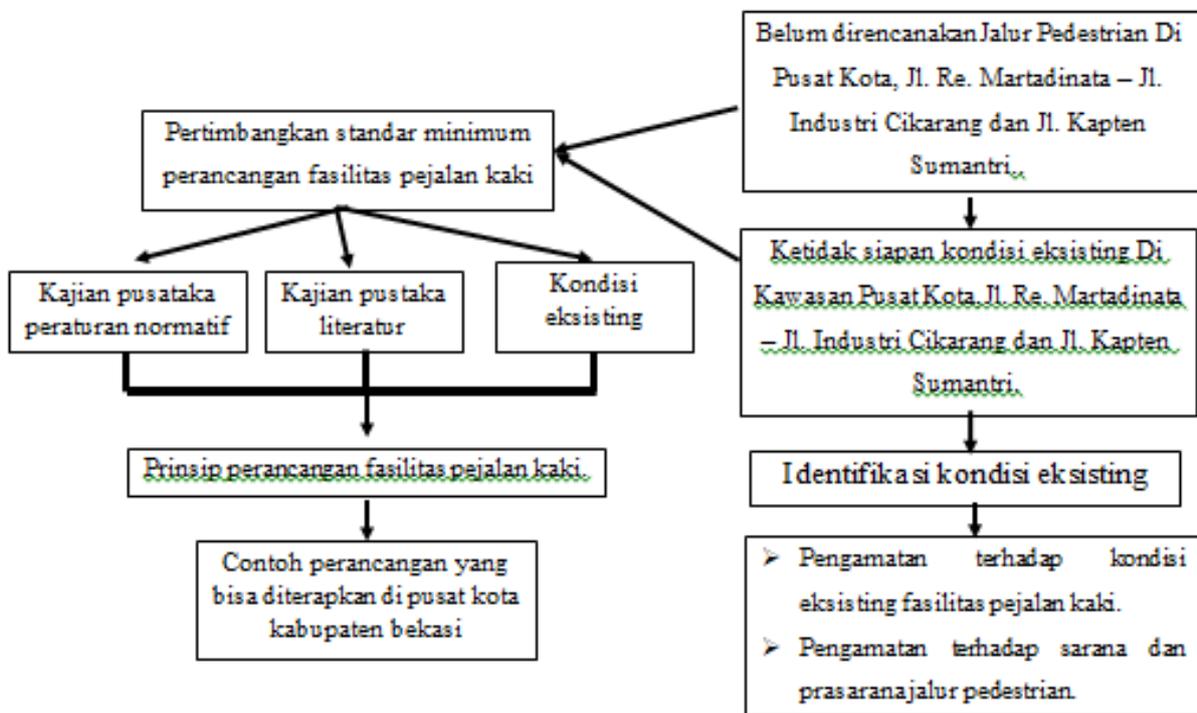
1.5.3 Analisis Data

Metoda analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu analisis deskriptif kualitatif analisis ini digunakan karena data – data yang dibutuhkan dalam seluruh sasaran. Hampir seluruh data – data yang dibutuhkan berasal dari survei langsung ke lokasi penelitian sehingga perlu diolah agar menjadi *output* yang berguna bagi penelitian.

1.6 Kerangka Penelitian

Kerang pemikian akan dibuat berdasarkan latar belakang, tujuan, sasaran, metodologi penelitian, sampai hasil akhir yang diharapkan seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.4
Kerangka Pemikiran



Sumber : Analisis 2018

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk mendukung kelancaran penelitian dibutuhkan langkah-langkah yang sistematis dalam penulisan. Sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi tentang Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan, Saran, Ruang lingkup penelitian, Metodologi, Sistematika pembahasan.

BAB 2 KAJIAN PERATURAN NORMATIF DAN LITERATUR

Bab ini berisi tentang seluruh kajian peraturan normatif dan studi literatur terkait dengan Kawasan Pusat Kota, Hirarki Jalan, Prinsip Perancangan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki, Ketentuan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki, Kesimpulan.

BAB 3 SISTEM TRANSPORTASI DAN FASILITAS DI PUSAT KOTA KECAMATAN CIKARANG UTARA

Bab ini akan mengkaji gambaran umum Kecamatan Cikarang Utara, gambaran umum kawasan pusat kota Kecamatan Cikarang Utara, pola keterkaitan antara pusat – pusat kegiatan, pedestrian dan kegiatan pedagang kaki lima, hambatan, persoalan, di Pusat Kota Kecamatan Cikarang Utara, persoalan desain dan standar teknis, kesimpulan.

BAB 4 PRINSIP PERANCANGAN FASILITAS PEJALAN KAKI DI KAWASAN PUSAT KOTA KECAMATAN CIKARANG UTARA

Bab ini berisi kesimpulan, prinsip perancangan fasilitas pejalan kaki berdasarkan pertimbangan perbandingan antara kajian normatif, kajian literatur, dengan kondisi eksisting menghasilkan prinsip perancangan fasilitas pejalan kaki sesuai dengan lahan yang tersedia di kawasan pusat kota Kecamatan Cikarang Utara. Bab ini diakhiri dengan rekomendasi, kelemahan studi, serta saran studi lanjutan.